

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia, dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai bagian dari kehidupan dalam masyarakat<sup>1</sup>. Keluarga dimulai dari dua sosok manusia yakni seorang suami dan seorang istri, mereka berdua merupakan batu pertama bagi pembentukan sebuah mahligai keluarga atau mereka merupakan tanah tempat tumbuh, berkembang dan berbuah pohon keluarga. Kalau tanahnya bagus tentu pohon yang tumbuh disitu akan tumbuh, berkembang dan berbuah bagus pula.

---

1 .Djamal Latief, H. M SH , *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.1982, Hlm 12

Di Indonesia segala masalah perkawinan diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam yang hal ini khusus mengatur tentang perkawinan menurut agama Islam. Dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud perkawinan adalah :

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.”

Dari pengertian perkawinan tersebut diatas maka hidup dalam perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera selamat dunia hingga akherat, maka diantara keduanya harus ada saling hormat dan menghormati, selalu terbuka dan adanya kesamaan dalam cita-cita. Masyarakat Indonesia memandang perkawinan sebagai hal yang sangat suci baik dari segi adat dan agama, karena itu masyarakat benar-benar akan menjaga tradisi tersebut.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga

untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.

Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan lagi hal tabu yang selayaknya dihindari.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari

putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah

“Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”<sup>2</sup>

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .”
2. “Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.”
3. “Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.”

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa Undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian

---

2 Soebekti SH. Prof, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*., Cet XXI: PT Inter Massa, 1987, Hlm. 247

maka dari berbagi peraturan tersebut dapat di ketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Sejak di berlakukanya UU No. 7 tahun 1989 kemudian dirubah UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang tata cara mengajukan cerai talak dan cerai gugat bagi mereka yang beragama islam yang dilakukan di Pengadilan Agama, telah diatur dalam Undang-undang ini. Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 66 sampai pasal 86, dan dengan diberlakukanya Undang-undang Peradilan Agama tersebut berarti mencabut ketentuan dalam pasal 63 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 dimana isinya menyebutkan bahwa “Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh peradilan umum.”

Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut maka Pengadilan Agama itu mempunyai Kompetensi Absolut, untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam antara lain adalah mengenai perceraian

Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasanya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami isteri, kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri.

Setelah diadakan penelitian tentang alasan-alasan terjadi perceraian antara suami isteri tersebut maka Hakim dalam memutus perkara Perceraian diharapkan mampu untuk merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian dituangkan didalam pertimbangan hukumnya, peraturan perundang-undangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman
- 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3 Undang-undang No. 3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4 Kitab Hukum Acara Perdata (HIR)
- 5 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 6 INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Terkait dengan masalah yang akan di teliti oleh penulis mengenai Aspek Yuridis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Sebagai salah satu Acuan Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian, maka penulis mencoba menguraikan sedikit tentang sejarah pembentukan Inpres RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan kekuatan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hakim dalam memutuskan perkara perceraian yakni sebagai berikut :

Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini masih banyak warga Islam di Indonesia yang memperjuangkan pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum formal, yakni berdasar pada penetapan Negara sebagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk tertentu. Hal inilah yang menginspirasi lahirnya Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI. Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas yang didasari oleh Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing.

Selain itu didalam masyarakat dirasakan adanya beberapa kelemahan , seperti hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama hampir dalam setiap persoalan. Dan untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu hukum umum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menjamin kepastian hukum<sup>3</sup>.

Agar hukum Islam dapat berlaku di Indonesia maka, harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat, harus ada persepsi yang seragam mengenai syari'ah. Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh tim pelaksana

---

3 Erfaniah Zuhriah, S.Ag" *Konstitusionalisasi Hukum Islam Di Indonesia*", makalah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , Maret, 2009.

proyek yang di tunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 tanggal 25 maret 1985. Jangka waktu pelaksanaan proyek adalah dua tahun terhitung sejak saat ditetapkannya SKB.

Tugas pokok proyek adalah melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam, dan tugas ini di selenggarakan dengan cara:

- a. Pengumpulan data, dilakukan dengan mengadakan pengkajian kitab-kitab kuning dan menyusun kaidah-kaidah hukum dari imam mazdhab serta disesuaikan dengan bidang-bidang ilmu hukum umum.
- b. Wawancara, dilakukan terhadap tokoh-tokoh ulama yang berpengalaman dan berwibawa.
- c. Lokakarya, hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.
- d. Studi perbandingan, untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum atau seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari Negara-negara Islam lainnya.

Setelah tugas proyek tersebut selesai, proses selanjutnya naskah akhir Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Perkawinan
- b. Buku II tentang Kewarisan.
- c. Buku III tentang Wakaf.



Ketiga buku tersebut mengalami penghalusan redaksi yang intensif di ciawi–bogor yang dilakukan tim besar proyek untuk selanjutnya di sampaikan kepada presiden, oleh Menteri Agama dengan surat 14 maret 1988 No:MA/123/1988 Hal: Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian lahir Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang dalam diktumnya menyatakan : Menginstruksikan, kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Perkawinan
- b. Buku II tentang Kewarisan.
- c. Buku III tentang Wakaf.

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam ini dapat dijadikan pedoman bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Peradilan Agama. Didalam pasal 62 huruf (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 dirubah Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama *Jo* pasal 184 HIR menyebutkan :

Pasal 62 UU No 7 tahun 1989 dirubah UU No 3 tahun 2006;

*“Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.”*

*Pasal 184 HIR. (1). Didalam putusan hakim harus dimuatkan ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu .*

*(2). Didalam putusan hakim yang berdasar pada peraturan undang-undang yang pasti, maka peraturan itu harus disebutkan .*

Pada prinsipnya setiap putusan yang dibuat dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan atau pertimbangan hukum

yang menggambarkan pokok pikiran Hakim serta memuat dasar-dasar hukum baik dari sumber hukum tertulis (undang-undang) maupun dari sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusannya

Mengenai kekuatan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama di karenakan sebagai salah satu sumber hukum tertulis yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara perceraian, selain peraturan perundangan-undangan yang lainnya dan Kompilasi Hukum Islam ini di terapkan di Pengadilan Agama di karenakan mengandung asas personalitas keislaman bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam. Menurut Yahya Harahap asas personalitas keislaman bila dikaitkan dengan perkara perdata bidang tertentu, sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Maksud atau penegasan mengenai asas ini adalah<sup>4</sup> :

- a. Suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau
- b. Suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam.

Maka melaksanakan peradilan merupakan tugas suci karena didalam peradilan terdapat beberapa tugas antara lain, memerintakan kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah kejahatan (*mungkar*)<sup>5</sup>, bila tidak terdapat peradilan dalam suatu masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang

---

4 M.Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Jakarta ; Pustaka Kartini, 1990 Hlm 37

5 T.M,Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang : Pustaka Ricki Putra, 1997, Hlm 3

kacau. Dalam melaksanakan kekuasaan peradilan, harus ada undang-undang dan aturan-aturan yang wajib di patuhi oleh para hakim, dan dalam memutuskan suatu perkara hakim dituntut untuk memberikan keputusan yang adil bagi para pihak yang beracara. Hal ini didasarkan pada Al-qur'an : (Surat 4, An-Nisa Ayat : 58) yaitu sebagai berikut :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, supaya kamu menetapkan ( hukum) dengan adil”.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut pada dasarnya setiap putusan yang dibuat dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran Hakim serta memuat dasar-dasar hukum baik dari sumber hukum tertulis (undang-undang) maupun dari sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul **“ASPEK YURIDIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI SALAH SATU ACUAN BAGI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN)”**.

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas

permasalahan tentang Aspek Yuridis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Sebagai Salah Satu Acuan Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sragen.?
2. Apa yang mendasari hakim di Pengadilan Agama di Sragen menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam memutuskan perkara perceraian?
3. Apakah ada perbedaan hakim memutus perkara perceraian sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam ?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sragen
2. Untuk mendeskripsikan dasar hakim di Pengadilan Agama di Sragen menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam memutuskan perkara perceraian.

3. Untuk mendeskripsikan perbedaan hakim memutus perkara perceraian sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sragen, sekaligus memperkaya teori kepustakaan hukum khususnya hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang di hadapi oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus perceraian khususnya di wilayah Sragen

#### **F. METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan,

sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan<sup>6</sup>

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, disebut juga penelitian hukum doktinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>7</sup> Dalam penelitian ini yang dicari adalah putusan Pengadilan Agama Sragen dalam memutuskan perkara perceraian.

#### 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif , yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya<sup>8</sup>. Metode deksriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendikripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

---

6 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Pustaka, 1997.

7 Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 1995, .Hlm 38

8 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres, 1998: Hlm 58

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini di Pengadilan Agama Sragen, dengan pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis dan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh sebagai gejala lain yang ada di lapangan dengan mengadakan penemuan langsung pada obyek yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang berumbur dari perundang-undangan, buku literatur, Al-Quran, Al-Hadits, Yurisprudensi dan yang ada hubungannya dengan materi yang di bahas.

### 5. Metode Pengumpulan Data

#### a. Penelitian kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan obyek penelitian<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Bandung : Mandar Maji, 1991 Hlm 80

Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang di teliti, dengan cara menelaah atau membaca buku-buku literatur peraturan perundang-undangan, Al-Quran, Al-Hadist maupun kumpulan yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas.

#### b. Penelitian Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam obyek penelitian. dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan yaitu Wawancara.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi.<sup>10</sup>

Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sragen dan pihak yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Metode Analisa Data

Setelah data di kumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk, menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini bersifat kualitatif

---

9 S.Nasution, *Metode Resech*, Jakarta : Bumi Aksara 2001.



Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif.

Didalam model analisa interaktif terdapat tiga komponen pokok berupa

a. Reduksi data

Reduksi data adalah sajian analisa suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut,

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus di uji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut : Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang

ditarik kurang mantap kekurangan data maka penulis dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunanya dibuat sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut .

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN PENELITIAN**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sisematika Penelitian

### **BAB II. TINJUAN PUSTAKA**

- A. Tinjuan Umum Mengenai Perkawinan dan Perceraian
  - 1. Pengertian Perkawinan
  - 2. Tujuan Perkawinan
  - 3. Rukun Perkawinan
  - 4. Syarat Sahnya Perkawinan

## 5. Perceraian

### B. Tinjauan umum tentang Peradilan Agama

1. Kompetensi dan Asas –Asas Umum Peradilan Agama
  - a. Kompetensi Absolut Peradilan Agama
  - b. Asas-asas umum Peradilan Agama
2. Produk-produk Peradilan Agama dan Pelaksanaannya
  - a. Produk-produk Peradilan Agama
  - b. Pelaksanaan putusan dan penetapan

## BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sragen.
2. Yang mendasari hakim di Pengadilan Agama di Sragen menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam memutuskan perkara perceraian
3. Perbedaan hakim memutus perkara perceraian sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam

### B. Pembahasan

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sragen.

2. Yang mendasari hakim di Pengadilan Agama di Sragen menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam memutuskan perkara perceraian
3. Perbedaan hakim memutus perkara perceraian sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam

#### BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN